

EKSPLORASI POTENSI PENGEMBANGAN SEKTOR KEUANGAN SYARIAH DALAM MENINGKATKAN INKLUSI KEUANGAN DI PADANGSIDIMPUAN

Sahara Bulan Nasution
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Kabupaten Mandailing Natal

Keyword:

Finansial Inclusion, Sharia Finance, Finansial Literacy, Analytic Hierarchy Process (AHP)

Artikel History:

Submitted: Dec 19, 2024

Accepted: Dec 30, 2024

Published: Dec 31, 2024

*** Corresponding author**

e-mail:

saharabulannasution@gmail.com

Abstract

This research aims to examine the potential for developing the sharia financial sector in increasing financial inclusion in Padangsidempuan City. The Analytic Hierarchy Process (AHP) approach was used with data obtained through surveys and in-depth interviews. The research results show that the main obstacles are limited infrastructure, low human resource competency, and the dominance of the conventional financial sector. The proposed solutions include sharia financial education, technology development, and collaboration with small businesses. This research emphasizes the importance of regulation, technological innovation, and community involvement in expanding access to sharia finance. Future research is recommended to compare the effectiveness of policies in various regions and examine the long-term impact of Islamic financial technology.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji potensi pengembangan sektor keuangan syariah dalam meningkatkan inklusi keuangan di Kota Padangsidempuan. Pendekatan Analytic Hierarchy Process (AHP) digunakan dengan data yang diperoleh melalui survei dan wawancara mendalam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kendala utama adalah keterbatasan infrastruktur, rendahnya kompetensi sumber daya manusia, dan dominasi sektor keuangan konvensional. Solusi yang diusulkan antara lain edukasi keuangan syariah, pengembangan teknologi, dan kolaborasi dengan usaha kecil. Penelitian ini menekankan pentingnya regulasi, inovasi teknologi, dan keterlibatan masyarakat dalam memperluas akses keuangan syariah. Penelitian di masa depan disarankan untuk membandingkan efektivitas kebijakan di berbagai wilayah dan mengkaji dampak jangka panjang dari teknologi keuangan Islam.

Kata Kunci: Inklusi Keuangan, Keuangan Syariah, Literasi Keuangan, Analytic Hierarchy Process (AHP).

PENDAHULUAN

Pemerintah di berbagai negara memberikan perhatian besar pada upaya meningkatkan edukasi dan literasi keuangan masyarakat, yang pada gilirannya dapat mendorong peningkatan akses dan penggunaan layanan keuangan oleh masyarakat. Tingkat literasi dan inklusi yang tinggi memberikan manfaat signifikan bagi individu, lembaga keuangan, dan negara, seperti mendorong pertumbuhan ekonomi, menurunkan

tingkat kemiskinan dan ketimpangan pendapatan, serta memperkuat stabilitas sistem keuangan (Muksal, Nevi Hasnita, 2023).

Inovasi produk keuangan syariah saat ini menjadi sorotan, produk pembiayaan mikro syariah yang memberikan akses lebih luas kepada masyarakat yang sebelumnya terbatas pada pembiayaan konvensional. Selain itu, sukuk syariah sebagai instrumen investasi semakin mendapat perhatian dari investor lokal dan internasional, membantu mendiversifikasi portofolio investasi dan mendukung pembangunan infrastruktur (Lestari, 2019).

Inovasi produk keuangan syariah bertujuan untuk meningkatkan inklusi keuangan di Indonesia. Sebagai bagian dari inisiatif global dalam mendukung pembangunan ekonomi berkelanjutan, inklusi keuangan secara internasional telah terbukti mampu mengurangi tingkat kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui akses terhadap layanan keuangan formal (Dayyan & Mansyur, 2023). Di Indonesia, sektor keuangan syariah berkembang seiring dengan mayoritas penduduk muslim. Namun, tingkat inklusi keuangan di Kota Padangsidempuan masih sangat rendah. Keterbatasan akses terhadap layanan keuangan formal dipengaruhi oleh rendahnya literasi keuangan. Meski demikian, terdapat peluang besar untuk memajukan keuangan syariah di wilayah ini jika hambatan-hambatan tertentu dapat diatasi.

Untuk mendukung perkembangan sektor ini, pemerintah Indonesia secara aktif merancang dan menerapkan berbagai regulasi yang mendukung keberlanjutan sektor keuangan syariah. Kebijakan tersebut mencakup kemudahan dalam pendirian lembaga keuangan syariah, peningkatan perlindungan konsumen, serta dorongan untuk meningkatkan transparansi operasional (Mastura, Yuni Safitri, 2023). Perlu ditekankan bahwa keberhasilan sektor keuangan syariah juga sangat bergantung pada peningkatan literasi keuangan syariah di tengah masyarakat. Program pendidikan, pelatihan, dan kampanye literasi keuangan syariah menjadi bagian penting dari upaya pemerintah untuk meningkatkan pemahaman dan partisipasi masyarakat terhadap produk dan layanan keuangan syariah (Ratna Gumilang et al., 2023).

Penelitian ini akan membahas sejumlah isu yang menjadi perhatian utama. Pertama, rendahnya inklusi keuangan di Padangsidempuan menjadi tantangan yang harus diatasi. Akses masyarakat terhadap layanan keuangan formal masih sangat terbatas, partisipasi dalam produk dan layanan keuangan rendah, serta tingkat pemahaman dan literasi keuangan masih kurang. Selain itu, lambatnya perkembangan sektor keuangan syariah juga menjadi masalah penting. Meskipun mayoritas penduduk

Padangsidempuan beragama Islam, sektor keuangan syariah belum menunjukkan pertumbuhan yang signifikan. Terbatasnya ketersediaan produk dan layanan keuangan syariah menjadi kendala utama dalam meningkatkan inklusi keuangan serta mendukung pemberdayaan ekonomi masyarakat muslim di wilayah ini (Khairiyati & Krisnawati, 2019; Nengsih, 2023).

Berbagai penelitian sebelumnya telah mengeksplorasi inklusi keuangan syariah pada tingkat nasional dan regional. Namun, pemahaman mendalam tentang perkembangan sektor keuangan syariah di daerah kecil seperti Padangsidempuan masih terbatas. Sebagian besar penelitian cenderung terfokus pada wilayah dengan struktur keuangan yang mapan, sehingga strategi untuk daerah di mana persaingan antar bank minim dan dominasi bank konvensional tidak relevan seringkali jarang dibahas, apalagi dengan pendekatan yang mencerminkan kondisi unik setempat secara mendalam (Marginingsih, 2021; Rahadiyan & Sari, 2019).

Indeks literasi dan inklusi keuangan syariah menjadi salah satu indikator penting untuk mengukur tingkat pemahaman dan akses masyarakat Indonesia terhadap produk dan layanan keuangan syariah, terutama di sektor perbankan syariah, pasar modal syariah, dan industri keuangan non-bank syariah (IKNB syariah). Inklusi keuangan mengacu pada kemudahan akses terhadap berbagai produk dan layanan keuangan, seperti perbankan, asuransi, dan pasar modal (Martono & Febriyanti, 2023). Rendahnya inklusi keuangan dapat menghambat pertumbuhan ekonomi dan pembangunan sosial suatu wilayah. Oleh karena itu, indeks literasi dan inklusi keuangan syariah diharapkan menjadi dasar dalam merancang strategi yang efektif untuk memajukan industri keuangan syariah di Indonesia.

Tantangan teknologi dan literasi keuangan juga menjadi masalah yang perlu diatasi. Implementasi fintech syariah adalah salah satu solusi untuk meningkatkan inklusi keuangan menghadapi tantangan seperti literasi keuangan yang terbatas di kalangan masyarakat, kepercayaan terhadap teknologi keuangan syariah, serta perluasan jangkauan fintech syariah di tengah infrastruktur dan konektivitas yang mungkin terbatas (Nasir Tajul Aripin et al., 2022; Nurjanah et al., 2024). Penelitian ini akan menggali potensi dan tantangan penggunaan fintech syariah untuk memahami efektivitasnya dalam meningkatkan inklusi keuangan di Padangsidempuan.

Fahlevi (2019) mengatakan walaupun studi tentang inovasi yang menopang inklusi keuangan dan literasi keuangan Syariah di Indonesia sudah cukup populer, namun studi yang secara khusus mengeksplorasi potensi pengembangannya di daerah

yang bukan ladang subur nya keuangan Syariah seperti di Padangsidempuan masih sangat jarang. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk memahami sejauh mana sektor keuangan syariah telah dikembangkan di daerah daerah kecil di Indonesia yang dalam hal ini diwakili oleh Padangsidempuan, mengeksplorasi kendala dan peluang yang dihadapi, serta mengidentifikasi strategi yang dapat meningkatkan inklusi keuangan melalui sektor keuangan syariah.

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi potensi pengembangan sektor keuangan syariah dalam meningkatkan inklusi keuangan di Kota Padangsidempuan. Selain mengidentifikasi kendala dan peluang, penelitian ini juga menawarkan strategi praktis yang dapat diterapkan oleh pemerintah dan lembaga keuangan syariah. Kontribusi penelitian ini adalah memberikan wawasan baru tentang pendekatan inklusif di daerah dengan tantangan unik, sekaligus memperkaya literatur terkait inklusi keuangan syariah di Indonesia.

Penelitian ini memiliki signifikansi penting karena tingkat inklusi keuangan di Kota Padangsidempuan masih berada pada level rendah, meskipun wilayah ini didominasi oleh penduduk muslim yang memiliki potensi besar untuk mendukung perkembangan sektor keuangan syariah. Tantangan seperti keterbatasan infrastruktur, rendahnya tingkat literasi keuangan, dan dominasi sektor keuangan konvensional menjadi penghambat utama yang perlu diatasi untuk memperluas akses masyarakat terhadap layanan keuangan formal. Selain itu, studi tentang inklusi keuangan syariah di daerah kecil seperti Padangsidempuan masih sangat terbatas, sehingga penelitian ini menawarkan kontribusi signifikan dalam mengisi celah tersebut. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan panduan strategis bagi pemerintah, lembaga keuangan, dan pemangku kepentingan lainnya dalam merumuskan kebijakan yang relevan, sekaligus mendukung upaya nasional dalam meningkatkan inklusi keuangan. Selain itu, penelitian ini juga memperkaya literatur terkait strategi pengembangan keuangan syariah di daerah dengan tantangan yang khas.

Artikel ini diawali dengan tinjauan pustaka yang membahas teori dan temuan sebelumnya terkait inklusi keuangan dan keuangan syariah. Selanjutnya, bagian metode menjelaskan pendekatan kualitatif dan kuantitatif menggunakan *Analytic Hierarchy Process* (AHP). Bagian hasil dan pembahasan menguraikan temuan utama terkait kendala, peluang, dan strategi pengembangan sektor keuangan syariah di Padangsidempuan. Artikel diakhiri dengan kesimpulan, implikasi praktis, dan saran untuk penelitian selanjutnya.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang kemudian diubah menjadi penelitian kuantitatif menggunakan metode *Analytic Hierarchy Process* (AHP). AHP adalah sebuah metode pengambilan keputusan yang dikembangkan oleh Thomas L. Saaty pada tahun 1970-an. Metode ini dirancang untuk membantu para pengambil keputusan dalam mengorganisir dan menganalisis keputusan yang kompleks dengan memprioritaskan berbagai opsi berdasarkan sejumlah kriteria yang telah ditentukan.

Penelitian ini menggunakan metode *Analytic Hierarchy Process* (AHP) karena pendekatan ini sangat efektif dalam menganalisis masalah yang kompleks dan memerlukan prioritas keputusan berbasis kriteria. AHP memungkinkan pengambilan keputusan berdasarkan penilaian perbandingan berpasangan (*pairwise comparison*), yang membantu menentukan prioritas kendala, peluang, dan strategi pengembangan sektor keuangan syariah. Metode ini dipilih karena mampu mengintegrasikan data kualitatif dan kuantitatif, sehingga sesuai dengan tujuan penelitian yang melibatkan berbagai perspektif pemangku kepentingan.

Data primer dikumpulkan melalui survei dan wawancara mendalam dengan enam narasumber yang terdiri dari praktisi lembaga keuangan syariah dan pengguna layanan keuangan syariah di Padangsidimpuan. Survei dilakukan untuk memperoleh penilaian terstruktur terkait prioritas kendala, peluang, dan strategi, sementara wawancara digunakan untuk memahami konteks lokal dan memperkuat analisis kualitatif. Data yang terkumpul kemudian dianalisis menggunakan AHP, yang melibatkan penyusunan matriks perbandingan berpasangan, penghitungan bobot kriteria dan subkriteria, serta pengujian konsistensi hasil.

Proses AHP melibatkan penilaian perbandingan berpasangan antara kriteria dan antara alternatif berdasarkan kriteria. Penilaian ini dilakukan dalam bentuk matriks perbandingan berpasangan, di mana setiap elemen dibandingkan satu sama lain dalam hal kepentingannya terhadap suatu kriteria. Dari matriks ini, AHP menghitung bobot atau skala prioritas untuk setiap kriteria dan alternatif, mencerminkan kepentingan relatif dari setiap elemen dalam mencapai tujuan utama. Selain itu, AHP juga mengukur konsistensi dari penilaian perbandingan berpasangan untuk memastikan bahwa penilaian yang dibuat oleh pengambil keputusan konsisten dan logis. Jika indeks konsistensi terlalu tinggi, maka pengambil keputusan harus meninjau kembali penilaian mereka.

Tabel.1 Unit Analisis Penelitian

No.	Nama Pakar	Posisi
1	Halimahtussahdiah	Customer Service (BSI)
2	Ebda Gustining	Pembiayaan Mikro (BSI)
3	Wahyuni Simbolon	Marketing Funding (BSI)
4	Devi Yulianti	Pemakai Jasa Keuangan Syariah
5	Ermil Fauziah Daulay	Pemakai Jasa Keuangan Syariah
6	Syafri Ahmad Siregar	Pemakai Jasa Keuangan Syariah

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kendala Pengembangan Sektor Keuangan Syariah dalam Meningkatkan Inklusi Keuangan di Kota Padangsidimpuan

Hasil penelitian menunjukkan beberapa kendala yang menjadi hambatan dalam pengembangan sektor keuangan syariah di Kota Padangsidimpuan. Kluster Masalah Internal menyoroti beberapa isu utama yang dihadapi, yang pertama adalah keterbatasan akses dan konektivitas infrastruktur keuangan syariah. Hal ini mencerminkan tantangan nyata dalam menyediakan layanan keuangan syariah yang mudah diakses oleh masyarakat. Terbatasnya jaringan kantor cabang atau keterbatasan dalam akses teknologi digital yang dapat menghubungkan nasabah dengan layanan keuangan syariah secara efektif. Ketidakmampuan dalam membangun infrastruktur yang memadai dapat memperlambat pertumbuhan sektor keuangan syariah, meskipun potensinya besar.

Kemudian, masalah kompetensi edukasi SDM dalam lembaga keuangan syariah (LKS) juga menunjukkan bahwa rendahnya kualifikasi dan pengetahuan tentang prinsip-prinsip keuangan syariah dapat mempengaruhi kualitas layanan yang diberikan. Kurangnya pemahaman tentang produk-produk keuangan syariah di antara para petugas bank syariah atau konsultan keuangan syariah dapat membatasi kemampuan mereka untuk memberikan layanan yang sesuai dengan kebutuhan nasabah.

Di sisi lain, kluster Masalah Eksternal mengungkapkan dominasi yang masih kuat dari sektor keuangan konvensional dalam pasar. Meskipun ada upaya untuk mengembangkan sektor keuangan syariah, sektor konvensional masih lebih mendominasi dalam hal pasar dan kapasitas untuk menjangkau lebih banyak nasabah. Banyak masyarakat lebih akrab dengan produk dan layanan dari bank-bank konvensional yang telah mapan dan memiliki jaringan luas, sementara kurangnya pemahaman atau eksposur terhadap produk keuangan syariah dapat menghambat adopsi dan pertumbuhan sektor ini.

Dukungan pemerintah yang belum optimal juga menjadi kendala signifikan. Meskipun pemerintah memiliki peran penting dalam mendorong inklusi keuangan, terbatasnya dukungan dalam bentuk kebijakan, insentif, atau infrastruktur pendukung dapat memperlambat perkembangan sektor keuangan syariah. Misalnya, kurangnya insentif fiskal untuk produk keuangan syariah atau kebijakan regulasi yang tidak mendukung pertumbuhan sektor ini dapat menghambat minat institusi keuangan untuk mengembangkan lebih lanjut produk dan layanan syariah.

Studi ini mengidentifikasi beberapa kendala utama dalam pengembangan sektor keuangan syariah di Kota Padangsidempuan, yang sejalan dengan temuan dari kajian-kajian terdahulu. Masalah pertama adalah keterbatasan akses dan konektivitas infrastruktur keuangan syariah, sebuah tantangan yang telah dikaji dalam literatur oleh Omwansa & Waema, serta Wambua & Datche. Kedua, kurangnya kompetensi edukasi SDM di Lembaga Keuangan Syariah (LKS), yang telah didiskusikan oleh Song et al., dan Asyik et al., mempengaruhi kualitas layanan dan penerimaan masyarakat terhadap produk keuangan syariah.

Di sisi eksternal, dominasi yang masih kuat dari sektor keuangan konvensional dalam pasar, sebagaimana dibahas oleh kajian Ismael & Ali, serta Kalunda & Ogada, menjadi hambatan bagi pertumbuhan sektor keuangan syariah. Ketidakterlibatan pemerintah secara optimal, yang telah dipelajari oleh Aggarwal & Klapper, serta Khan, juga menjadi kendala serius dalam mendorong inklusi keuangan syariah di Kota Padangsidempuan. Kurangnya insentif fiskal atau regulasi yang mendukung juga dapat menghambat minat LKS untuk mengembangkan produk dan layanan syariah.

Solusi Pengembangan Sektor Keuangan Syariah dalam Meningkatkan Inklusi Keuangan di Kota Padangsidempuan

Studi ini mengidentifikasi beberapa solusi potensial untuk mengembangkan sektor keuangan syariah dengan tujuan meningkatkan inklusi keuangan di Kota Padangsidempuan. Prioritas utama berdasarkan hasil penelitian adalah kampanye program edukasi keuangan syariah di berbagai komunitas masyarakat. Hal ini penting karena meningkatkan pemahaman masyarakat tentang prinsip-prinsip keuangan syariah serta manfaatnya dapat membuka akses keuangan bagi lebih banyak individu dan kelompok. Misalnya, melalui penyuluhan rutin di masjid-masjid atau pusat kegiatan keagamaan, di mana masyarakat dapat belajar tentang produk dan layanan keuangan syariah secara langsung.

Selanjutnya, dorongan kepada lembaga keuangan syariah (LKS) untuk berinvestasi dalam teknologi dan infrastruktur juga mendapat perhatian yang signifikan. Dengan meningkatkan teknologi dan infrastruktur, LKS dapat menyediakan layanan yang lebih efisien dan mudah diakses oleh masyarakat, baik di kota maupun di daerah pedesaan. Seperti, investasi dalam teknologi *mobile banking* atau aplikasi digital yang memudahkan nasabah untuk melakukan transaksi perbankan syariah tanpa harus datang ke kantor cabang.

Selain itu, memperluas dan menyediakan layanan keuangan syariah di toko-toko kecil di Padangsidempuan juga menjadi solusi yang dianggap penting. Hal ini dapat memberikan akses keuangan yang lebih dekat dengan masyarakat sehari-hari, terutama bagi masyarakat yang tidak memiliki akses mudah ke bank atau lembaga keuangan formal. Ini bisa dilakukan kerjasama antara LKS dengan pemilik warung atau toko untuk menyediakan layanan simpan-pinjam syariah atau produk keuangan lainnya di tempat-tempat yang strategis.

Studi ini menyarankan beberapa solusi yang didukung oleh literatur terdahulu. Kampanye edukasi keuangan syariah di berbagai komunitas, dapat meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap produk dan layanan keuangan syariah. Kolaborasi dengan mikro finansial, serta investasi dalam teknologi dan infrastruktur keuangan syariah, dapat memperluas akses dan meningkatkan efisiensi layanan keuangan syariah di daerah (Wijayanti & Setiawan, 2023).

Dengan mengimplementasikan solusi-solusi ini secara komprehensif, diharapkan dapat mengatasi beberapa kendala yang dihadapi dalam mengembangkan sektor keuangan syariah dan secara signifikan meningkatkan inklusi keuangan di Kota Padangsidempuan. Dukungan dari pemerintah, kerja sama antar lembaga keuangan, dan kesadaran masyarakat yang meningkat akan menjadi kunci keberhasilan dalam menjalankan solusi-solusi ini untuk mencapai inklusi keuangan yang lebih luas dan berkelanjutan.

Strategi Pengembangan Sektor Keuangan Syariah dalam Meningkatkan Inklusi Keuangan di Kota Padangsidempuan

Studi ini mengungkapkan beberapa strategi krusial dalam pengembangan sektor keuangan syariah untuk meningkatkan inklusi keuangan di Kota Padangsidempuan. Prioritas utama dari hasil penelitian adalah melibatkan tokoh agama dan masyarakat serta memperkuat peran lembaga keagamaan dalam upaya edukasi dan literasi

keuangan syariah. Strategi ini memiliki dampak signifikan karena tokoh agama dan masyarakat memiliki kepercayaan yang kuat dari masyarakat lokal, sehingga pesan-pesan tentang keuangan syariah dapat lebih mudah diterima dan dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya adalah penggunaan mimbar di masjid-masjid sebagai platform untuk menyampaikan edukasi keuangan syariah, di mana komunitas dapat belajar tentang nilai-nilai ekonomi Islam dan prinsip-prinsip keuangan syariah.

Selanjutnya, membentuk forum komunikasi dan koordinasi antara lembaga keuangan syariah (LKS), pemerintah, akademisi, dan masyarakat juga dianggap penting dalam strategi pengembangan sektor keuangan syariah. Kolaborasi ini memungkinkan pertukaran informasi, ide, dan dukungan yang dapat memperkuat infrastruktur keuangan syariah di Kota Padangsidempuan. Misalnya adalah pertemuan rutin antara LKS dengan pemangku kepentingan lainnya untuk merancang program-program inklusi keuangan yang lebih efektif dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat lokal.

Selain itu, strategi untuk meningkatkan anggaran pemerintah dalam edukasi dan literasi keuangan syariah kepada masyarakat juga mendapat perhatian dalam penelitian ini. Anggaran yang memadai dari pemerintah dapat digunakan untuk mendukung program-program edukasi, pelatihan, dan penelitian yang diperlukan untuk meningkatkan pemahaman dan partisipasi masyarakat dalam sektor keuangan syariah. Misalnya, alokasi dana untuk pelatihan karyawan LKS dalam memberikan pelayanan yang lebih baik atau untuk mengadakan seminar dan lokakarya tentang keuangan syariah bagi masyarakat umum.

Strategi melibatkan tokoh agama dan lembaga keagamaan, juga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap produk keuangan syariah (Soemitra et al., 2021). Pendekatan komunikasi dan koordinasi antara LKS, pemerintah, akademisi, dan masyarakat dapat memperkuat infrastruktur dan kebijakan yang mendukung inklusi keuangan syariah secara holistik.

Dengan mengimplementasikan strategi-strategi ini secara terpadu dan berkelanjutan, diharapkan dapat mengatasi kendala-kendala dalam pengembangan sektor keuangan syariah dan meningkatkan inklusi keuangan secara luas di Kota Padangsidempuan. Dukungan yang kuat dari semua pemangku kepentingan, termasuk masyarakat luas, akan menjadi kunci kesuksesan dalam mewujudkan visi inklusi keuangan yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

KESIMPULAN

Penelitian ini mengeksplorasi potensi pengembangan sektor keuangan syariah dalam meningkatkan inklusi keuangan di Padangsidempuan. Berdasarkan analisis menggunakan metode Analytic Hierarchy Process (AHP), penelitian ini mengidentifikasi bahwa kendala utama dalam pengembangan sektor keuangan syariah meliputi keterbatasan akses dan konektivitas infrastruktur, rendahnya kompetensi SDM di Lembaga Keuangan Syariah (LKS), dominasi sektor keuangan konvensional, serta dukungan pemerintah yang belum optimal. Produk pembiayaan menjadi yang paling diminati oleh masyarakat, diikuti oleh deposito, tabungan, dan giro.

Solusi prioritas yang diusulkan meliputi pelaksanaan kampanye literasi keuangan syariah di komunitas lokal untuk meningkatkan pemahaman masyarakat, mendorong LKS untuk berinvestasi dalam teknologi digital guna memperluas akses dan efisiensi layanan, serta menjalin kolaborasi dengan toko kecil dan warung untuk menyediakan layanan keuangan syariah. Strategi pengembangan yang diidentifikasi mencakup melibatkan tokoh agama dan lembaga keagamaan dalam edukasi keuangan syariah, pembentukan forum kolaborasi antara LKS, pemerintah, akademisi, dan masyarakat, serta peningkatan anggaran pemerintah untuk mendukung program literasi keuangan syariah.

Penelitian ini memberikan kontribusi penting pada literatur akademis dengan memperluas aplikasi AHP dalam konteks lokal untuk memahami inklusi keuangan syariah. Secara praktis, penelitian ini menawarkan panduan bagi pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, LKS, dan komunitas lokal, untuk meningkatkan akses keuangan syariah. Implikasi implementasi mencakup alokasi anggaran khusus oleh pemerintah untuk infrastruktur dan edukasi keuangan syariah, pengembangan pelatihan SDM serta investasi teknologi digital oleh LKS, dan peningkatan kesadaran masyarakat melalui peran aktif tokoh agama dan program komunitas.

Namun, penelitian ini memiliki batasan, yaitu hasilnya mungkin sulit digeneralisasi untuk wilayah lain dengan karakteristik berbeda, dan pengumpulan data yang terbatas pada responden tertentu dapat memengaruhi representasi populasi secara keseluruhan. Dengan implementasi solusi dan strategi yang telah diidentifikasi, penelitian ini diharapkan dapat memberikan dampak positif pada pengembangan sektor keuangan syariah dan peningkatan inklusi keuangan di Padangsidempuan.

DAFTAR PUSTAKA

- Dayyan, M., & Mansyur. (2023). Analysis Sharia Financial Literacy of Kualasimpang City Community in the Digital Era. *Jurnal Ekonomi Syariah, Akuntansi dan Perbankan (JESKaPe)*, 7(2), 134–146. <https://doi.org/10.52490/jeskape.v7i2.1459>
- Fahlevi, R. (2019). Inklusi keuangan syariah melalui inovasi fintech di sektor filantropi. *Proceeding IAIN Batusangkar*, 4(1), 205–212.
- Khairiyati, C., & Krisnawati, A. (2019). Analisis Pengaruh Literasi Keuangan Terhadap Keputusan Investasi Pada Masyarakat Kota Bandung. *Jurnal manajemen dan bisnis*, 3(2), 301–312.
- Lestari, N. M. (2019). Available at: <http://journal.uhamka.ac.id/index.php/jei>. *Jurnal Ekonomi Islam*, 10(November), 138–151. <https://journal.uhamka.ac.id/index.php/jei/article/view/3764>
- Marginingsih, R. (2021). Financial Technology (Fintech) Dalam Inklusi Keuangan Nasional di Masa Pandemi Covid-19. *Moneter - Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 8(1), 56–64. <https://doi.org/10.31294/moneter.v8i1.9903>
- Martono, S., & Febriyanti, R. (2023). Pengaruh Inklusi Keuangan, Literasi Keuangan Dan Pengelolaan Keuangan Terhadap Kinerja Umkm Di Kota Salatiga. *Jurnal Ekonomi Pendidikan Dan Kewirausahaan*, 11(2), 153–168. <https://doi.org/10.26740/jepk.v11n2.p153-168>
- Mastura, Yuni Safitri, A. Y. (2023). Pengaruh Literasi Keuangan, Religiusitas dan Media Sosial Terhadap Perilaku Konsumtif Belanja Online. *Jurnal Manajemen Keuangan Syariah*, 7(1), 66–82. <https://doi.org/10.48175/ijarsct-13062>
- Muksal, Nevi Hasnita, P. N. (2023). Tingkat Literasi dan Inklusi Keuangan Syariah Pada Masyarakat Kota Banda Aceh. *Jurnal Manajemen Keuangan Syariah*, 7(1), 18–34.
- Nasir Tajul Aripin, Nur Fatwa, & Mulawarman Hannase. (2022). Layanan Digital Bank Syariah Sebagai Faktor Pendorong Indeks Literasi dan Inklusi Keuangan Syariah. *Syarikat: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah*, 5(1), 29–45. [https://doi.org/10.25299/syarikat.2022.vol5\(1\).9362](https://doi.org/10.25299/syarikat.2022.vol5(1).9362)

- Nengsih, N. (2023). Strategi Perbankan Syariah dalam Meningkatkan Inklusi Keuangan di Indonesia. *Jurnal Al-Ittifaq: Jurnal Ekonomi Syariah*, 3(1), 1–13.
- Nurjanah, R., Yahya, A., Kosim, M., Putri, N. K., & Ningamah, H. (2024). Implikasi Penggunaan E-money, Literasi Keuangan, dan Sikap Keuangan Terhadap Perilaku Konsumtif. *Jurnal Ecogen*, 7(1), 64. <https://doi.org/10.24036/jmpe.v7i1.15646>
- Rahadiyan, I., & Sari, A. R. (2019). Peluang Dan Tantangan Implementasi Fintech Peer To Peer Lending Sebagai Salah Satu Upaya Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Indonesia. *Defendonesia*, 4(1), 18–28. <https://doi.org/10.54755/defendonesia.v4i1.79>
- Ratna Gumilang, R., Amanda, H., & Ginanjar, Y. (2023). Impact Motivasi Investasi, Literasi Keuangan, dan Perilaku Keuangan Terhadap Keputusan Investasi. *Coopetition : Jurnal Ilmiah Manajemen*, 14(1), 91–100. <https://doi.org/10.32670/coopetition.v14i1.3033>
- Soemitra, A., A. A., & Daulay, A. N. (2021). Studi Literatur Tujuan Ideal Lembaga Keuangan Dan Perbankan Islam. *HUMAN FALAH: Jurnal Studi Ekonomi dan Bisnis Islam*, 8(2), 1–19. <https://doi.org/10.30829/hf.v8i2.10050>
- Wijayanti, R., & Setiawan, D. (2023). The role of the board of directors and the sharia supervisory board on sustainability reports. *Journal of Open Innovation: Technology, Market, and Complexity*, 9(3), 100083. <https://doi.org/10.1016/j.joitmc.2023.100083>